**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Diterapkannya desentralisasi otonomi daerah akan menimbulkan permasalahan dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang mana untuk melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah kabupaten/kota mendapat wewenang yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah maka penggalian dan pengolahan keuangan daerah dengan segala sumber daya merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting dan sangat menentukan sehingga perlu diusahakan bagaimana mengolah sistem pengolahan keuangan daerah agar dapat terlaksana dengan baik. Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pinjaman luar negeri, ini bertujuan untuk memperkecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintah pusat sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Kemandirian pemerintah kabupaten/kota dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh kabupaten dan kota tersebut untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesan Dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

**Tabel 1.1**

**Fenomena Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

**Kota Bandung**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kriteria** | **Sumber** | **Nama pengarang** | **Pendapat** |
| Fenomena | Diposting  12 Desember 2015  13:16 WIB  Web : <http://www.tribunnews.com/regional/2015/12/12/target-meleset-kepala-dinas-pelayanan-pajak-kota-bandung-menyerah> | Y Gustaman | Fenomena pada tahun 2015 Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Priana Wirasaputra, menyerah karena pemasukan pajak tak mencapai target pendapatan asli daerah pada 2015. Sampai akhir Desember 2015, paling banter tercapai 90 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1,6 triliun," ujar Priana usai rapat dengan anggota DPRD Kota Bandung, Jumat (11/12/2015). Menurut Priana tidak tercapainya target pemasukan dari pajak terjadi secara nasional, tidak hanya di Kota Bandung, Jawa Barat, tapi hampir semua daerah tak.capai target. |

**Grafik 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2015**

Kota Bandung tidak berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 dari target 1,6 triliun hanya terealisasi 90% atau sekitar 1,4 triliun dari target, pendapatan asli daerah tidak mencapai target dikarenakan beberapa sektor pajak yang tidak mencapai target.

**Tabel 1.2**

**Fenomena Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah**

**Kota Bekasi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kriteria** | **Sumber** | **Nama Pengarang** | **Pendapat** |
| Fenomena | Diposting :  23 Desember 2016  09:29 WIB  Web :  <http://m.mediaindonesia.com/read/detail/84167-bekasi-gagal-capai-target-pad> | Gana Buana | Fenomena Pada Tahun 2016 KOTA Bekasi, Jawa Barat, hanya berhasil memenuhi 87,5% target pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) 2016 sebesar Rp1,6 triliun. Beberapa sektor pajak gagal memenuhi komitmen pencapaian yang di awal tahun telah disepakati. Sekretaris Dispenda Kota Bekasi, Ali Fauzi, menyampaikan realisasi PAD hingga pekan ini baru mencapai Rp1,4 triliun. Artinya, pihaknya masih harus mengejar ketinggalan sekitar Rp200 miliar untuk memenuhi target PAD 2016 sebesar Rp1,6 triliun. Sektor pajak yang harus dikejar, terutama pajak parkir, reklame, dan pajak air tanah, kata Ali Fauzi, saat dihubungi Media Indonesia, Senin (19/12). Menurut Ali, perolehan PAD memang jadi wewenang tiap sektor di tingkat kedinasan. Dispenda hanya bertugas melaporkan perkembangan perolehan dan mengingatkan tiap dinas persentase ketinggalan yang harus mereka kejar. Beberapa sektor pajak, kata dia, harus terus dikejar, antara lain pajak reklame pada Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU) yang ditargetkan Rp79 miliar, tetapi saat ini capaiannya baru sekitar 38,71%, atau sebanyak Rp30 miliar. Sisa target yang harus dicapai ialah sebanyak Rp49 miliar. Hal yang sama juga terjadi pada pajak penerangan jalan umum dari DPPPJU. Target pajaknya tahun ini Rp294,9 miliar dan saat ini baru tercapai 76,68%, atau sekitar Rp226,1 miliar dan sisanya masih menjadi beban yang harus di capai sebesar Rp68,8 miliar. Dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, target pajak parkir sebanyak RP27,6 miliar, tetapi baru terealisasi sekitar 92,04%, atau sekitar Rp25,4 miliar dan sisa target yang harus dikejar Rp2,2 miliar rupiah. Di Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi, untuk pajak air tanah target tahun ini Rp11,5 miliar, realiasinya baru mencapai 93,36%, atau Rp10,7 miliar dan kekurangan target hingga pekan ini sekitar Rp800 juta. Untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun ini di target pendapatan sebanyak Rp251,7 miliar capaianya sudah sekitar 99,69%, atau Rp250,9 miliar dan sisa target sekitar Rp800 juta. Pendapatan dari BPHTB tahun ini ditarget sebanyak Rp314,3 miliar capaian, hingga saat ini baru 84,54%, atau sekitar Rp265,7 miliar sehingga sisa target ialah sebanyak Rp48,6 juta. |

**Grafik 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi 2016**

Kota Bekasi tidak berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2016 dari target 1,6 triliun hanya terealisasi 1,4 triliun, pendapatan asli daerah tidak mencapai target dikarenakan beberapa sektor pajak tidak mencapai target dijelaskan di grafik 1.3 :

**Grafik 1.3 Pajak Daerah Kota Bekasi 2016**

Pajak penerangan jalan target pajaknya tahun ini Rp294,9 miliar dan saat ini baru tercapai 76,68% atau sekitar Rp226,1 miliar dan sisanya masih menjadi beban harus dicapai sebesar Rp 68,8 miliar, Pajak Reklame yang ditargetkan Rp79 miliar, tetapi saat ini capaiannya baru sekitar 38,71%, atau sebanyak Rp30 miliar. Sisa target yang harus dicapai ialah sebanyak Rp49 miliar, Pajak Parkir target pajak parkir sebanyak RP27,6 miliar, tetapi baru terealisasi sekitar 92,04%, atau sekitar Rp25,4 miliar dan sisa target yang harus dikejar Rp2,2 miliar rupiah, Pajak Air Tanah target tahun ini Rp11,5 miliar, realiasinya baru mencapai 93,36%, atau Rp10,7 miliar dan kekurangan target hingga pekan ini sekitar Rp800 juta, Pajak Bumi dan Bangunan target pendapatan sebanyak Rp251,7 miliar capaianya sudah sekitar 99,69%, atau Rp250,9 miliar dan sisa target sekitar Rp800 juta, dan Pajak BPHTB tahun ini ditarget sebanyak Rp314,3 miliar capaian, hingga saat ini baru 84,54%, atau sekitar Rp265,7 miliar sehingga sisa target ialah sebanyak Rp48,6 juta.

**Tabel 1.3**

**Fenomena Pendapatan Asli Daerah**

**Kota Batam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kriteria** | **Sumber** | **Nama Pengarang** | **Pendapat** |
| Fenomena | Diposting :  30 Maret 2018  14:43WIB  Web :  <https://kepri.antaranews.com/berita/47754/pad-batam-2017-capai-rp9741-miliar> | Rusdianto | Fenomena pada tahun 2017 pada Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 2017 mencapai Rp974,1 miliar atau tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1,086 triliun. Terealisasi sebesar 89,65 persen dari target, kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam rapat paripurna dengan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Akhir Tahun Anggaran 2017 di Batam, Kamis. Ia mengatakan pihaknya menghadapi sejumlah permasalahan untuk mencapai target PAD 2017. |

**Grafik 1.4 Pendapatan Asli Daerah Kota Batam 2017**

Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 2017 mencapai Rp974,1 miliar atau tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp1,086 triliun, terealisasi sebesar 89,65 persen dari target.

**Tabel 1.4**

**Target dan Realisasi Pajak Daerah**

**Kota Bandung Tahun 2013 hingga 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Mata Pajak | Target | Realiasi |
| 2013 | Hotel | 148,000,000,000.00 | 177,490,303,830.00 |
|  | Restoran | 102,000,000,000.00 | 118,700,322,856.00 |
|  | Hiburan | 35,500,000,000.00 | 37,767,188,531.00 |
|  | Reklame | 18,500,000,000.00 | 17,603,910,300.00 |
|  | PPJ | 121,500,000,000.00 | 135,297,036,036.00 |
|  | Parkir | 7,500,000,000.00 | 7,796,908,376.00 |
|  | PAT | 3,000,000,000.00 | 3,556,097,210.00 |
|  | PBB | 277,000,000,000.00 | 280,104,269,023.00 |
|  | BPTHB | 350,000,000,000.00 | 415,761,410,854.00 |
|  | Total Pajak Daerah | 1,063,000,000,000.00 | 1,194,077,447,016.00 |
| 2014 | Hotel | 202,850,000,000.00 | 204,152,062,826.00 |
|  | Restoran | 140,000,000,000.00 | 142,399,711,300.00 |
|  | Hiburan | 45,000,000,000.00 | 40,730,151,211.00 |
|  | Reklame | 24,000,000,000.00 | 23,643,479,085.00 |
|  | PPJ | 158,000,000,000.00 | 159,123,681,023.00 |
|  | Parkir | 12,000,000,000.00 | 12,155,079,755.00 |
|  | PAT | 30,000,000,000.00 | 26,032,655,125.00 |
|  | PBB | 360,000,000,000.00 | 372,575,609,204.00 |
|  | BPTHB | 428,150,000,000.00 | 418,786,427,368.00 |
|  | Total Pajak Daerah | 1,400,000,000,000.00 | 1,399,598,856,897.00 |
| 2015 | Hotel | 260,000,000,000.00 | 215,285,361,236.00 |
|  | Restoran | 170,000,000,000.00 | 181,868,358,705.00 |
|  | Hiburan | 60,000,000,000.00 | 50,449,101,884.00 |
|  | Reklame | 15,000,000,000.00 | 18,107,052,336.00 |
|  | PPJ | 180,000,000,000.00 | 178,144,137,262.00 |
|  | Parkir | 30,000,000,000.00 | 20,234,816,571.00 |
|  | PAT | 32,850,000,000.00 | 30,260,440,425.00 |
|  | PBB | 422,000,000,000.00 | 399,912,243,399.00 |
|  | BPTHB | 428,150,000,000.00 | 399,885,860,295.00 |
|  | Total Pajak Daerah | 1,598,000,000,000.00 | 1,494,147,372,113.00 |
| 2016 | Hotel | 260,000,000,000.00 | 274,748,550,679.00 |
|  | Restoran | 235,000,000,000.00 | 241,786,988,140.00 |
|  | Hiburan | 68,000,000,000.00 | 69,816,433,868.00 |
|  | Reklame | 316,716,770,000.00 | 25,653,532,922.00 |
|  | PPJ | 173,200,000,000.00 | 177,358,328,595.00 |
|  | Parkir | 26,000,000,000.00 | 29,289,132,387.00 |
|  | PAT | 32,500,000,000.00 | 33,686,169,278.00 |
|  | PBB | 415,000,000,000.00 | 417,139,352,208.00 |
|  | BPTHB | 660,000,000,000.00 | 440,329,093,979.00 |
|  | Total Pajak Daerah | 2,186,416,770,000.00 | 1,709,807,582,056.00 |
| 2017 | Hotel | 300,000,000,000.00 | 295,385,661,260.00 |
|  | Restoran | 267,500,000,000.00 | 278,760,356,903.00 |
|  | Hiburan | 85,000,000,000.00 | 85,094,574,308.00 |
|  | Reklame | 240,548,569,530.00 | 12,844,048,144.00 |
|  | PPJ | 185,000,000,000.00 | 193,033,914,175.00 |
|  | Parkir | 37,500,000,000.00 | 40,137,159,581.00 |
|  | PAT | 33,500,000,000.00 | 30,520,721,234.00 |
|  | PBB | 578,500,000,000.00 | 543,210,584,172.00 |
|  | BPTHB | 672,548,569,530.00 | 696,097,106,549.00 |
|  | Total Pajak Daerah | 2,400,097,139,060.00 | 2,175,084,126,326.00 |

Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2012-2017, Diolah

Tabel 1.4 Menunjukan bahwa Pajak Daerah tidak memenuhi target terjadi pada Pajak Daerah pada tahun 2014, 2015, 2016 & 2017

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung selama periode tahun 2012 hingga 2017 selalu mengalami penurunan setiap tahunya selengkapnya dapat dilihat di Tabel 1.3

**Tabel 1.5**

**Target dan Realisasi Total Pendatapatan Asli Daerah**

**Kota Bandung 2012 hingga 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Target | Realisasi | Realisasi PAD |
| 2013 | Rp 1,407,759,106,133.00 | Rp 1,442,755,238,323.00 | 102,48% |
| 2014 | Rp 1,808,509,055,075.00 | Rp 1,716,057,298,378.00 | 94,89% |
| 2015 | Rp 2,066,246,830,526.00 | Rp 1,859,694,643,505.00 | 90% |
| 2016 | Rp 2,767,404,903,364.00 | Rp 2,152,755,704,962.00 | 77,79% |
| 2017 | Rp 3,015,836,590,302.00 | Rp 2,578,457,420,885.00 | 85,50% |
| Rata-rata Realisasi | | | 93,05% |

Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung 2012-2017, Diolah

Tabel 1.5 menunjukan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Dilihat dari persentase hanya pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tidak memenuhi target yaitu 94,89%, 90%, 77,79%, 85,50% namun secara rata-rata realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang hampir selalu terpenuhi, dikhawatirkan *budgetary slack* pada antara tahun 2013-2017.

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak PPJ, dan Pajak Parkir yang Diteliti Oleh Phaurela Artha Wulandari (2016), dan Emy Iryanie (2016)
2. Pajak PAT dan Pajak BPTHB yang diteliti oleh Desi Astuti (2016)
3. Pajak PBB, dan Pajak BPTHB Rio Rahmat Yusran (2017), dan Dian Lestari Siregar (2017)
4. Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak PPJ, dan Pajak Parkir yang diteliti oleh Vadia Vamiagustin (2014), Suhadak (2014), dan Muhammad saifi (2014)
5. Pajak Restoran, dan Pajak Parkiryang diteliti oleh Asma Mufidah (2015)
6. Pajak PAT, dan Pajak BPTHB Jenni Hidayathi Putri (2018)

**Tabel 1.6**

**Faktor-faktor yang menpengaruhi Pendapatan Asli Daerah**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nama Peneliti | Tahun | Pajak Hotel | Pajak Restoran | | Pajak Hiburan | Pajak Reklame | Pajak PPJ | Pajak Parkir | Pajak  PAT | Pajak PBB | Pajak BPTHB |
| Phaurela Artha Wulandari | 2016 | √ | √ | X | | √ | √ | X | - | - | - |
| Desi Astuti | 2015 | - | - | - | | - | - | - | √ | - | √ |
| Rio Rahmat Yusran | 2017 | - | - | - | | - | - | - | - | √ | √ |
| Vadia Vamiagustin | 2014 | X | √ | √ | | √ | √ | X | - | - | - |
| Asma Mufidah | 2015 | - | √ | - | | - | - | √ | - | - | - |
| Jenni Hidayathi Putri | 2018 | - | - | - | | - | - | - | X | - | √ |

Keterangan √ = Berpengaruh

X= Tidak Berpengaruh

- = Tidak Diteliti

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Phaurela Artha Wulandari (2016) dengan judul Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin.

Perbedaannya dari penelitian sebelumnya adalah variable yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti penulis menambakan Pajak PAT, Pajak PBB, Pajak BPTHB yang tidak diteliti oleh peneliti sebelumnya.

Oleh karena itu dibutuhkan analisis mengenai komponen pembentuk pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah sebagai sumber penerimaan utama dalam pendapatan asli daerah Kota Bandung. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “**PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung Periode 2013-2017) ”**

**1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

**1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas diindikasikan terdapat masalah dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain:

1. Rata-rata Pajak Daerah yang diperoleh lebih rendah dari pada target Pajak Daerah.
2. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami

naik-turun.

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh lebih rendah dari pada target Pendapatan Asli Daerah.

**1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan atas penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana Pajak Daerah di Kota Bandung tahun 2013-2017.
2. Bagaimana tingkat Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung tahun 2013-2017.
3. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
4. Pajak Daerah yang diturunkan Kedalam 9 mata Pajak secara parsial.
   1. Seberapa besar pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.
   2. Seberapa besar pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli rudituDaerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.
   3. Seberapa besar pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.
   4. Seberapa besar pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.
   5. Seberapa besar pengaruh Pajak PPJU terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.
   6. Seberapa besar pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.
   7. Seberapa besar pengaruh Pajak Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.
   8. Seberapa besar pengaruh Pajak PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.
   9. Seberapa besar pengaruh Pajak BPTHB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.

5. Seberapa besar pengaruh Pajak Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung selama periode 2013-2017.

**1.3 Tujuan Penelitan**

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk menganalisis Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung selama periode tahun 2013-2017.
2. Untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Bandung selama Periode 2013-2017.
3. Untuk menganalisis Besarnya Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.
4. Untuk menganalisis Besarnya Kontribusi Pajak secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.1 Untuk menganalisis Besarnya Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.2 Untuk menganalisis Besarnya Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.3 Untuk menganalisis Besarnya Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.4 Untuk menganalisis Besarnya Pengaruh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.5 Untuk menganalisis Besarnya Pengaruh Pajak PPJU terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.6 Untuk menganalisis Besarnya Pengaruh Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.7 Untuk menganalisis Besarnya Pengaruh Pajak Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.8 Untuk menganalisis Besarnya Pengaruh Pajak PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

4.9 Untuk menganalisis Besarnya Pengaruh Pajak BPTHB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

1. Untuk menganalisis Besarnya Kontribusi Pajak secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2013-2017.

**1.4 Kegunaan Penelitian**

**1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penilitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, wawasan serta informasi tentang Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

**1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan oleh penulis berguna bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi penulis dan juga dapat mengaplikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan untuk mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang terjadi dilapangan.

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau menjadi masukan dan tambahan informasi bagi DISPENDA kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.

1. Bagi Pihak Lain

Sedangkan bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

**1.5 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian sekunder yang diperoleh melalui data dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung ( DISPENDA Kota Bandung) .beralamat Jln.Wastukencana No. 2 Bandung.